

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan bank maupun non bank di Indonesia telah menjadi ujung tombak perekonomian negara di mana keduanya mempunyai peranan penting sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana yang menyimpan kelebihan dananya di lembaga keuangan dengan pihak yang kekurangan dana yang meminjam dana ke lembaga keuangan. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap lembaga keuangan menjadi sangat penting agar fungsi intermediasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika fungsi intermediasi tercapai maka penggunaan dana akan lebih optimal dan efisien yang akan berdampak pada meningkatnya aktivitas produktif dari dana yang dipinjamkan sehingga *output* aktifitas produksi akan meningkat dan lapangan kerja baru yang banyak bermunculan menambah taraf kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Muharam dan Pusvitasari, 2007).

Kegiatan yang dilakukan masyarakat sebagian besar berhubungan dengan uang, yang pada akhirnya melibatkan dunia perbankan, oleh karena itulah dalam kehidupan masyarakat perbankan mempunyai peranan penting. Di Indonesia perbankan dibedakan menjadi dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan syarat-syarat untuk mendirikan bank, menambah jumlah bank yang berdiri baik itu bank konvensional maupun bank syariah.

Sejarah perbankan Indonesia memperlihatkan bahwa bank konvensional jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan bank syariah yang baru ada di tahun

1992. Dengan waktu yang lebih lama itulah bank konvensional sudah lama menguasai pasar perbankan nasional dengan jumlah bank yang sudah banyak. Namun seiring dengan perkembangan dunia perbankan dan adanya kebutuhan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa keuangan yang berdasarkan Syariah Islam yaitu prinsip bagi hasil, maka pemerintah membuat Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia.

Perbankan syariah memiliki misi yang cukup unik dengan menjalankan tugas dan fungsi perbankan dengan berlandaskan aturan syariah. Dengan adanya bank syaria'ah di Indonesia tidak hanya memperluas akses terhadap pendanaan eksternal, namun juga untuk mengatasi masalah keraguan terhadap perbankan konvensional terkait pengenaan bunga pinjaman. Di samping melakukan transaksi yang sesuai dengan ketentuan syaria'ah, seperti pembiayaan seluruh jenis bisnis yang sesuai dengan aturan Islam.

Perbankan konvensional memiliki kontribusi yang besar terhadap upaya untuk mengembangkan sektor kecil dan mikro di Indonesia. Bank-bank tersebut menyediakan pinjaman baik dalam bentuk skema komersial atau dengan skema program pemberian kredit sebagai agen penyalur atau eksekusi Pemerintah Republik Indonesia (PRI). Beberapa bank komersial yang besar antara lain PT. Bank BRI, Tbk dan PT. Bank Danamon, Tbk yang telah lama

menjadi bank yang memegang peranan utama dalam memberikan pembiayaan terhadap sektor kecil menengah. Selain dari pada itu, PT, Bank BRI, Tbk telah lama menjadi institusi keuangan mikro terbesar di dunia (Patten et al, 2001).

Di awal perkembangannya perbankan syariah Berbagai kebijakan hukum pun dibuat guna mengatur jalannya kegiatan perbankan syariah. kegiatan pengaturan dan pengawasan perbankan syariah masih berbasis yang digunakan pada sistem perbankan konvensional. Namun, berbagai upaya terus dilakukan guna menghadapi tantangan tersebut, di antaranya dengan membentuk undang-undang perbankan syariah, surat keputusan dan peraturan-peraturan tertentu yang dikeluarkan langsung oleh Bank Indonesia (Susanto, 2008).

Perkembangan jumlah perbankan di Indonesia dari tahun 2012 hingga 2016 mengalami penurunan, Walaupun secara umum mengalami penurunan, Bank Umum Syariah (BUS) justru mengalami peningkatan jumlah bank, dari 11 bank di tahun 2012 menjadi 13 bank di tahun 2016. Sehingga bisa dilihat dari data yang ada, bahwa yang mengalami penurunan jumlah bank adalah Bank Umum Konvensional (BUK) yang semula di tahun 2012 terdapat 120 bank menjadi 118 bank di tahun 2016. Hal ini dikarenakan adanya sejumlah bank yang tidak mampu lagi beroperasi lagi sehingga memutuskan untuk tutup atau merger dengan bank lain. Namun, perkembangan jumlah kantor baik BUK maupun BUS keduanya mengalami peningkatan di tiap tahunnya seperti pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2012-2016

Tahun	2012		2013		2014		2015		2016	
Jenis	JB	JK								
BUK	120	29.945	120	31.847	119	32.739	118	32.963	118	32.777
BUS	11	1.745	11	1.998	12	2.163	12	1.990	13	1.597
Jumlah	131	31.690	131	33.845	131	34.902	130	34.953	131	34.374

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah 2016

Ket : JB = Jumlah Bank

JK= Jumlah Kantor

Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia jumlahnya semakin banyak dengan berbagai bentuk produk dan pelayanan yang diberikan dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Permasalahan yang paling penting adalah bagaimana kualitas kinerja dan kesehatan dari BUK dan BUS yang ada. Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank. Kondisi tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen resiko. Salah satu aspek penting dalam pengukuran kinerja perbankan adalah efisiensi. Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu yang mendasari seluruh kinerja sebuah perusahaan (Suseno, 2008:34).

Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat melakukan pengukuran efisiensi, pihak bank dihadapkan pada suatu kondisi bagaimana cara mendapatkan tingkat output yang optimal dengan tingkat input yang ada. Dengan

diidentifikasi alokasi input dan output, dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab ketidakefisienan.

Indikator efisiensi dapat dilihat dengan memperhatikan besarnya rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Kinerja perbankan dapat dikatakan efisien apabila rasio BOPO dan NPF mengalami penurunan, semakin rendah rasio BOPO, semakin efisien bank tersebut dalam operasionalnya (Eugenia Mardanugraha dalam Hartono, 2009:7). Predikat kesehatan bank dari segi BOPO menurut BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 adalah rasio $BOPO \leq 94\%$ = peringkat 1, $94\% < BOPO \leq 95\%$ = peringkat 2, $95\% < BOPO \leq 96\%$ = peringkat 3, $96\% < BOPO \leq 97\%$ = peringkat 4, $BOPO > 97\%$ peringkat 5.

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Meningkatnya kredit macet menurunkan aset bank dan dapat menyebabkan bank menjadi kurang sehat/*insolvent* atau kewajiban lebih besar dari pada aset (Silvanita, 2009:33). Timbulnya pembiayaan bermasalah diantaranya mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank (Dendawijaya, 2005:88).

Menurut (Hidayat, 2014:122), apabila tingkat NPF semakin rendah maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya apabila tingkat NPF tinggi maka bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Berdasarkan dari uraian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) memiliki pengaruh negatif

bagi profitabilitas bank. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio NPF ini menurut BI (2007) adalah: Peringkat 1 = $NPF < 2\%$; Peringkat 2 = $2\% = NPF < 5\%$; Peringkat 3 = $5\% = NPF < 8\%$; Peringkat 4 = $8\% = NPF < 12\%$; dan Peringkat 5 = $NPF = 12\%$. Berikut rasio keuangan BUK dan BUS.

Tabel 1.2
Perkembangan rasio keuangan BUK dan BUS di Indonesia
Tahun 2012-2016
(dalam persentase)

Tahun	Bank Umum Konvensional						Bank Umum Syariah					
	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
NPF/NPI	7,39	4,09	4,98	2,61	2,1	4,23	4,75	4,05	1,42	4,01	3,02	3,45
BOPO	87,03	84,22	88,75	87,4	86,14	86,71	84,9	77,3	82,2	82,6	82,38	81,88

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah 2016 (data diolah)

Nilai BOPO BUK selama tahun 2012-2016 selalu berada di atas BUS terlihat dari data tabel 1.3. Selain itu, masalah lain dari data di atas adalah masih fluktuatifnya nilai BOPO baik BUK maupun BUS. BUK mengalami penurunan di tahun 2013 kemudian naik lagi dan akhirnya turun sampai tahun 2016, sedangkan BUS mengalami dua kali penurunan nilai BOPO di tahun 2013 dan 2016 setelah mengalami kenaikan di tahun 2014 dan 2015. Hal ini menunjukkan bahwa BUK dan BUS tidak konsisten dalam hal efisiensi kegiatan operasionalnya.

Sedangkan untuk rata-rata tingkat permasalahan pembiayaan (NPF/NPL), BUK lebih tinggi dari BUS, jika dilihat dari lama berdirinya, BUK jauh lebih lama ada dari pada BUS. Maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kemampuan BUK dan BUS dalam mencapai efisiensi kegiatan operasinya sehingga nantinya manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat berkaitan dengan efisiensi pada bank masing-masing.

Mengukur efisiensi perbankan dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti melihat perbandingan indikator kinerja perbankan dan rasio keuangan, selain itu ada juga beberapa metode lain, yaitu pendekatan parametrik dan non parametrik (Hadad *et al.* , 2003:2). Pendekatan parametrik meliputi *Stochastic Frontier Approach* (SFA), *Distribution Free Approach* (DFA), dan *Thick Frontier Approach* (TFA), sedangkan yang non parametrik adalah dengan menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA).

Metode parametrik dan non parametrik memiliki beberapa perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah metode parametrik memasukkan *random error*, sedangkan non parametrik tidak memasukkan itu. Meskipun demikian, hasil yang ditunjukkan oleh kedua metode ini tidak jauh berbeda. Hal ini akan terjadi jika sampel yang dianalisis merupakan unit yang sama dan menggunakan proses produksi yang sama (Hadad *et al.* , 2003:2).

Pengukuran efisiensi Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam penelitian ini akan menggunakan metode non-parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA). Metode ini memiliki kelebihan yaitu mampu berhadapan dengan kasus input yang beragam, seperti faktor yang berada diluar kendali manajemen dan memudahkan perbandingan efisiensi dengan menggunakan kriteria yang seragam, melalui penggunaan bentuk rasio yang sederhana untuk mengetahui efisiensi setiap organisasi, termasuk lembaga perbankan (Putri dan Lukviarman, 2008:40).

Epstein dan Henderson (1989) dalam Hadad *et al.* (2003:2) juga menambahkan pendapatnya tentang keuntungan relatif penggunaan pendekatan ini lebih besar dibandingkan parametrik, yaitu pendekatan ini dapat mengidentifikasi unit yang digunakan sebagai referensi sehingga dapat membantu mencari penyebab

dan jalan keluar dari ketidakefisienan yang merupakan keuntungan utama dalam aplikasi manajerial.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memilih judul “**Analisis Efisiensi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)**”.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana efisiensi pada bank konvensional dan bank syariah di Indonesia dengan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) ?
2. Faktor apa yang berpengaruh terhadap efisiensi pada bank konvensional dan bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efisiensi pada bank konvensional dan syariah di Indonesia dengan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi secara parsial pada bank konvensional dan bank syariah?
3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi secara serentak pada bank konvensional dan bank syariah?

1.4. Manfaat penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tingkat efisiensi lembaga perbankan. Baik itu perbankan syariah maupun perbankan konvensional.

2. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan tambahan bagi mahasiswa/i PPs Ilmu Ekomi Universitas Negeri Medan.
3. Bagi Pengelola perbankan dan BI penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan bank dan penetapan kebijakan serta pengawasa perbankan dimasa yang akan datang dalam rangka efisiensi perbankan.
4. Dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi tentang perbandingan efisiensi bank syariah dan bank konvensional.

THE
Character Building
UNIVERSITY